

Tipe Partisipasi Politik Masyarakat Suku Bugis Dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020

Types of Political Participation of the Bugis Tribe's People in the 2020 Samarinda Mayor Election

Ahmad Dzaky¹, Adam Idris², Muhammad Hairul Saleh³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. II, No. 01

Page: 01-08

Published: 2023

KEYWORDS

Utilization, E-government, Employees Participation, Apathy, Spectator, Gladiator, Critic

CORRESPONDENCE

E-mail:

dzakyahmad147@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to determine the Types of Community Political Participation in the 2020 Samarinda Mayor Election. Using a descriptive method with a qualitative approach where data sources are obtained from observations and direct interviews in the field. To focus on his own research by looking at the opinions of Milbrath and Goel in Muslim (2018: 17) regarding the types of political participation, namely apathy, spectators, gladiators, critics.

Based on the results of this research, apathy is seen from the Bugis Tribe Community who do not pay attention to or escape from the political situation, especially in the 2020 Samarinda Mayor Election. The Spectator is the Bugis Tribe Community who only participates in voting in the 2020 Samarinda Mayor Election. Gladiators are the Bugis Tribe Community in The City of Samarinda, which took full part in the 2020 Samarinda Mayoral Election Contestation, started from voting, nominating himself to becoming the organizing team and campaigner. The critic is the Bugis Tribe Society who has a type of pressure or Non-Conventional Participation.

INTRODUCTION

Partisipasi Politik berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan suatu kelompok, kepentingan suatu golongan sehingga dalam kegiatan politik tersebut dapat melihat tingkat derajat suatu kelompoknya dalam menunjukkan suatu kepentingannya. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah melibatkan berbagai kelompok baik sebagai kontestan maupun sebagai pemilih itu sendiri. Kelompok-kelompok tersebut berasal dari identitas-identitas seperti Suku, Agama, Ras, Gender dan lain-lain yang memiliki suatu tujuan dalam membangun wilayah daerahnya tersebut.

Dalam kaitannya dengan partisipasi politik, Suku bugis di perantauan merupakan salah satu kelompok atau identitas yang memiliki partisipasi baik secara historis maupun secara sosial masyarakat, terkhususnya dalam

pembangunan daerah yang dimana mereka menetap. Dalam karakter kekeluargaan Masyarakat Suku Bugis yang menetap di daerah rantuanya tentunya memiliki tujuan untuk sukses sehingga Masyarakat Suku Bugis tentunya berkembang pesat mulai dari aspek ekonomi dengan berdagang hingga memilih berkarir politik dan menjadi pemimpin di wilayah tersebut sehingga akan adanya persaingan antara Masyarakat Suku Bugis, masyarakat suku lain yang merantau dan masyarakat lokal yang berada di daerah rantauannya.

Politik Identitas bisa menjadi sarana dalam merebutkan kekuasaan terutama dalam menentukan pemimpin di wilayahnya. Meskipun Politik Identitas masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat dikarenakan dapat memicu perpecahan, namun Politik identitas bisa menjadi sarana dalam

mengenal berbagai identitas-identitas terutama identitas suku serta sarana bagi masyarakat pada umumnya dalam berpartisipasi membangun wilayahnya terutama saat ini yang sudah memasuki era reformasi dan Otonomi Daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda merupakan Kota yang memiliki Populasi Masyarakat Suku Bugis terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan timur. Sehingga Masyarakat Suku Bugis banyak ikut serta juga dalam berpartisipasi politik di terutama dalam Pemilihan Walikota Samarinda. Pemilihan Walikota Samarinda secara langsung oleh masyarakat dalam sejarahnya pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2005 setelah penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sampai saat ini sudah dilaksanakan empat kali Pemilihan Walikota Samarinda secara langsung.

Pemilihan Walikota Samarinda pada Tahun 2020 di laksanakan serentak dengan pemilihan kepala daerah lainnya. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Walikota Samarinda yang merupakan pemilihan yang mana calon walikota dan wakil walikota samarinda memiliki latar belakang identitas yang berbeda, baik partai, agama, suku dan sebagainya. Dalam pemilihan Walikota Samarinda juga terdapat terdapat dua Tokoh Bugis yang bersaing yaitu Andi Harun sebagai Calon Walikota dan Muhammad Darlis sebagai Calon Wakil Walikota. Mereka memiliki pasangan berbeda dalam memperebutkan Kursi pemerintahan di Kota Samarinda.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tipe Partisipasi Politik Masyarakat Suku Bugis Dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020", dimana dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan

mengenai Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Walikota Samarinda yang mana difokuskan pada masyarakat Suku bugis di Kota Samarinda yang merupakan salah satu masyarakat rantau di Kota Samarinda.

THEORETICAL FRAMEWORK

Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan suatu putusan mengikutsertakan suatu individu atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu guna membantu serta melibatkan individu atau kelompok tersebut dalam suatu agenda dan mendorong adanya suatu peran dalam pencapaian sebuah tujuan. Menurut Poerwadarminta dalam Suharyanto (2014:153) Partisipasi yaitu adanya peran keikutsertaan dalam sebuah kegiatan yang besar serta ikut bertanggung jawab dan mengambil peran dalam aktivitas tersebut baik secara individu maupun kelompok. Partisipasi politik secara definisi merupakan aktivitas yang melibatkan individu atau sekumpulan orang-orang agar dapat mengikuti serta terlibat secara aktif dalam kehidupan politik salah satunya dengan melakukan pemilihan pemimpin bagi suatu daerah maupun negara serta dewan perwakilan baik secara langsung maupun tidak langsung mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik (Public Policy) (Budiarjo, 2008:36). Partisipasi politik juga dikatakan sebagai keikutsertaan dalam menjalankan suatu politik baik dalam mengambil dan memperbaiki berbagai kebijakan dalam pemerintahan maupun dalam kontestasi perebutan kekuasaan seperti pemilihan kepala daerah maupun legislatif.

Partisipasi politik memiliki bentuk-bentuk dalam suatu kegiatannya. Menurut Gabriel Almond dalam Syahfitri (2018:16) menjelaskan bahwa partisipasi politik terbagi menjadi dua bentuk yaitu Partisipasi Konvensional dan Non-Konvensional. Partisipasi Konvensional lebih mengarah ke partisipasi pemerintah yang

bersifat lebih mengikuti prosedural. Sedangkan Non-Konvensional lebih mengarah tindakan yang bersifat tidak mengikuti prosedural. Dengan kata lain Partisipasi Konvensional lebih mengarah ke sifat mendekati pemerintah dengan baik sedangkan Non-Konvensional lebih ke tindakan-tindakan yang bersifat mendesak pemerintah.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Meyer (2020:13) menjelaskan bahwa Partisipasi politik terbagi menjadi dua bentuk yaitu Partisipasi Aktif dan Partisipasi Pasif. Partisipasi aktif merupakan partisipasi yang melibatkan kegiatan masyarakat dan lebih mengarah ke keaktifan suatu masyarakat dalam hal mengenai berbenah dalam suatu kebijakan seperti pengajuan usul, pengajuan alternatif terhadap pemerintah, pengajuan kritik, saran, serta perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat dan ikut serta dalam penentuan pimpinan pemerintah melalui pemilihan umum. Sedangkan partisipasi pasif lebih mengarah masyarakat yang bersikap menerima dan mentaati serta melaksanakan begitu saja setiap kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah.

Bentuk partisipasi politik aktif maupun pasif dikembangkan lebih lanjut oleh Milbrath dan Goel menjadi beberapa tipe. Menurut Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17) menjelaskan bahwa partisipasi politik terbagi dalam berbagai tipe, yaitu antara lain:

1. Apatitis, dimana tipe apatis diartikan sebagai orang-orang yang menarik diri dalam berbagai kegiatan politik.
2. Spectator, merupakan orang-orang yang setidak-tidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum.
3. Gladiator, merupakan tipe orang-orang yang melibatkan diri secara aktif dalam aktivitas politik seperti menjadi komunikator yang melakukan hubungan secara tatap muka, kegiatan partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat.

4. Pengeritik, merupakan orang-orang yang berpartisipasi secara tidak konvensional.

Politik Identitas

Politik identitas mencantumkan berbagai identitas-identitas seperti suku, agama, etnis, ras, gender, ideologi, kelompok politik, bangsa, negara yang mana merupakan sebuah identitas untuk lebih mengenal ke berbagai kelompok lain. Pencantuman identitas ini menimbulkan perbedaan tujuan serta batasan-batasan antar kelompok. Politik identitas merupakan suatu output yang timbul karena adanya perbedaan dalam kehidupan manusia. Politik identitas juga merupakan biopolitik yang mana merupakan sebuah konsep politik baru yang merupakan suatu hal yang mendasarkan dari pada perbedaan-perbedaan yang muncul/timbun dari berbagai perbedaan.

Politik identitas menurut Donald L Morowitz mendefinisikan bahwa politik identitas digambarkan sebagai pembagian atau pemberian garis secara tegas, yang mana garis tersebut berfungsi untuk mengetahui peran seseorang sebagai anggota atau bukan dan peranan tersebut bersifat permanen yang tidak bisa diubah (Al-Farizi 2018:81). Sedangkan Politik identitas menurut Syafi'i dapat diartikan sebagai politik yang berkaitan dengan suatu identitas pengenal yang berkaitan dengan masalah suatu kelompok seperti etnis, agama, ideologi dan berbagai kepentingan yang pada umumnya diwakili oleh para elit-elit yang mewakili identitas-identitas tersebut (Daulay dkk 2019:51).

Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan suatu pesta demokrasi yang melibatkan masyarakat untuk memilih suatu pemimpin di wilayahnya yang bersifat jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia serta menggunakan hak suara dari masyarakat untuk menentukan pemimpin atau perwakilan rakyat di wilayahnya. Menurut

Gaffar dalam Wardhani (2018:59) Pemilihan umum merupakan sarana dalam mewujudkan kebebasan demokrasi di suatu negara. Kebebasan ini merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihan suatu pemimpin di wilayahnya. Pemilihan umum merupakan bagian dari praktik politik dalam pembentukan suatu pemerintahan serta tempat bagi masyarakat untuk berintraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu. Pemilihan Umum juga dibagi menjadi Tiga bagian yaitu Pertama, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, Pemilihan Umum Legislatif yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan yang ketiga, Pemilihan umum Kepala Daerah yang meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasanya disebut Pilkada merupakan sebuah asumsi yang tercipta sebuah kebebasan dari masyarakat atau rakyat dalam memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada telah memiliki sebuah atmosfer baru serta suasana baru dalam proses berdemokrasi di Indonesia khususnya di wilayah lokal atau daerah. Pilkada telah membidani lahirnya pemimpin-pemimpin baru di pemerintahan tingkat lokal yang benar-benar memiliki komitmen politik dengan rakyat serta mampu melakukan berbagai transformasi konkrit untuk membangun daerah (Patasaka 2015:28). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

METHOD

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:8) penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian suatu objek atau suatu hal yang ingin diteliti dengan menggunakan instrumen kunci dari hasil penelitian.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah untuk membatasi studi yang diteliti sehingga memberi kemudahan penulis dalam mengelola data. Adapun fokus penelitian penulisan ini adalah tipe-tipe Partisipasi Politik Menurut Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17) yaitu:

1. Apatis
2. Spectactor
3. Gladiator
4. Pengeritik

Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, Person (Orang) merupakan sumber data yang mana dapat memberikan data berupa jawaban secara langsung. Dalam memilih serta menentukan informan, peneliti menggunakan teknik gabungan Purpose Sampling dan Accidental Sampling. Menurut Sugiyono (2013:218) Purpose Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan melihat pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:85) Accidental Sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yang mana siapa saja yang kebetulan bertemu dengan informan yang tepat dijadikan sampel. Yang kedua, Place

(Tempat) merupakan tempat untuk melakukan pengambilan data. Untuk lokasi penelitian ini berada di Kota Samarinda. Yang ketiga, Paper (Kertas/Dokumen) merupakan sumber baik surat-surat, dokumen, arsip yang bisa menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

RESULT AND DISCUSSION

Apatis

Tipe Apatis merupakan tipe partisipan yang memiliki karakter atau sifat yang tidak peduli terhadap apa yang terjadi dengan situasi politik di wilayahnya. Menurut Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17) menjelaskan bahwa Tipe Apatis merupakan orang-orang yang menarik diri dari dalam berbagai kegiatan politik. Tipe Apatis merupakan orang-orang yang menarik diri dari dalam berbagai kegiatan politik. Salah satu kegiatan politik yang dilakukan oleh Masyarakat pada umumnya adalah Pemilihan Umum. Pemilihan umum dilakukan dalam memberikan suara atau mencalonkan diri sebagai pemimpin di wilayahnya. Masyarakat pada umumnya ikut serta dalam partisipasi politik khususnya dalam pemilihan umum dikarenakan itu merupakan Hak sebagai warga negara dalam negara demokratis. Akan tetapi sebagian masyarakat banyak yang tidak tertarik bahkan menarik diri dalam urusan kegiatan politik.

Secara keseluruhan informasi yang disampaikan dari beberapa informan Masyarakat Suku Bugis di Kota Samarinda bahwa kecenderungan Masyarakat Suku Bugis memiliki tipe apatis dalam partisipasi politik khususnya dalam Pemilihan Walikota Samarinda. Ada beberapa yang menjadi alasan sebagian Masyarakat Suku Bugis di Kota Samarinda yang memiliki tipe Apatis. Pertama, karena faktor ketidaktahuan terkait situasi politik di Kota Samarinda. Menurut pandangan mereka, mereka tidak terlalu memperhatikan seperti apa calon dalam memilih kontestasi pemilihan walikota samarinda. Tokohnya

seperti apa, latar belakangnya seperti apa, begitu juga dengan visi dan misi para calon beserta kampanyenya. Kedua, yaitu karena kecenderungan Masyarakat Suku Bugis terfokus dalam pekerjaannya terutama Masyarakat Suku Bugis yang merupakan masyarakat perantau yang bekerja di beberapa sektor seperti berdagang, menjadi pegawai dan beberapa pekerjaan lainnya. Yang ketiga, adalah faktor lingkungan seperti keluarga yang mungkin tidak ikut serta dalam Partisipasi sehingga anggota keluarganya harus mengikut dengan lingkungan keluarganya.

Selain dari karakteristik kecenderungan masyarakat suku bugis yang memiliki Tipe Apatis Pemilihan Walikota Samarinda juga dilaksanakan pada saat situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda. Dalam situasi ini sebagian Masyarakat merasa takut dan khawatir adanya terjadi kerumunan terutama pada saat memilih di TPS. Pihak KPU sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat akan tetapi Masyarakat akan merasa khawatir dengan situasi kondisi serta kesehatannya yang dikala itu Pandemi Covid-19 belum menurun sepenuhnya serta penerapan Vaksin Covid-19 belum diterapkan.

Spectator

Tipe Spectator merupakan tipe partisipasi politik yang bersifat setidaknya mengikuti satu hal dalam berpartisipasi politik yaitu melakukan pemilihan di pemilihan umum. Menurut Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17) menjelaskan bahwa tipe Spectator merupakan orang-orang atau masyarakat yang setidaknya-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Dari penjelasan di atas masyarakat pada umumnya tidak mengikuti kompotisi ataupun penyelenggara akan tetapi mereka lebih kearah pasrtisipasi di dalam pelaksanaannya setidaknya-tidaknya dalam konteks pemilihan umum, mereka hanya mengikuti pemilihan umum saja. Pada umumnya yang menjadi bagian dalam tipe ini adalah Masyarakat yang sedikit mengikuti

perkembangan politik dan hanya melihat hasilnya seperti apa serta lebih mengarah sekedar ikut berpartisipasi ataupun penonton dalam melihat situasi pemilihan umum. Selain itu juga yang menjadi bagian dari Spectator adalah masyarakat yang baru pertama kali ikut pemilihan umum yang dimana hanya sekedar ikut berpartisipasi. Tipe ini tidak terlalu berbeda dengan Tipe Apatis yang lebih memilih menarik diri dari berbagai hal terkait politik akan tetapi tipe ini lebih sekedar mengetahui sedikit terkait situasi politik dan ikut memilih dalam kontestasi pemilihan umum.

Secara keseluruhan informasi yang disampaikan dari beberapa informan Masyarakat Suku Bugis di Kota Samarinda bahwa kecenderungan Masyarakat Suku Bugis memiliki tipe Spectator dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu memilih pemula atau pertama kalinya ikut memilih terutama di Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020. Selain dari itu masyarakat juga bisa melihat secara garis besar terkait pasangan calon yang mencalonkan diri menjadi Walikota atau Wakil Walikota Samarinda. Melalui media sosial serta faktor lingkungan sangat berpengaruh ketertarikan dalam berpartisipasi politik salah satunya dengan pemilihan Walikota Samarinda ini.

Selain dari itu kesimpulan dari beberapa informan masyarakat suku buis yaitu kecenderungan juga Masyarakat Suku Bugis di Kota Samarinda hanya sekedar ikut memilih dikarenakan Masyarakat suku bugis pada umumnya memiliki pekerjaan di saat hari pemilihan umum yang membuat beberapa Masyarakat Suku Bugis sibuk dengan pekerjaannya. Selain itu juga kesadaran sebagian masyarakat yang memiliki tipe ini dikarenakan bahwa setiap masyarakat berhak atas haknya dalam proses pemilihan, terutama pemilihan umum. Jadi Masyarakat secara regulasi mereka mengikuti kewajiban dalam menentukan haknya dalam menentukan pemimpin yang akan

memimpin di daerahnya, salah satunya dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020.

Gladiator

Tipe Gladiator merupakan tipe partisipasi politik yang lebih melibatkan diri dalam situasi kondisi politik, terutama dalam pemilihan umum. Menurut Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17) menjelaskan bahwa tipe Gladiator merupakan tipe orang-orang yang melibatkan diri secara aktif dalam aktivitas politik seperti komunikator yang melakukan hubungan tatap muka, kegiatan partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Dalam tipe ini lebih menjelaskan masyarakat pada umumnya lebih ke sifatnya pelaksana, pembuat kebijakan, pencalonan, penyelenggara, tim kampanye dan lainnya sebagainya. Tipe ini lebih bersifat sangat aktif dalam berpartisipasi politik terutama penyelenggara dan peserta yang bersaing.

Secara keseluruhan informasi yang disampaikan dari beberapa informan Masyarakat dan Tokoh paguyuban Suku Bugis serta beberapa Dosen pengamat politik menjelaskan bahwa Partisipasi Politik Tipe Gladiator Masyarakat Suku Bugis dalam Pemilihan Walikota Samarinda dapat dilihat dari keaktifan ikut handil dalam pelaksanaan proses Pemilihan Walikota Samarinda baik mencalonkan diri, Penyelenggara, Hingga partisipan masyarakat langsung. Terutama beberapa tokoh Masyarakat Suku Bugis yang mencalonkan diri menjadi Walikota dan Wakil Walikota yaitu Andi Harun dan Muhammad Darlis. Selain dari itu juga ada beberapa Tokoh Masyarakat Suku Bugis menjadi petinggi parta seperti Andi Harun sendiri selaku Ketua Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Darlis selaku Ketua Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Rusman Yaqub selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, H. Syahfrudin selaku Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur, dan H. J. Jahidin

selaku Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Timur. Selain dari itu juga beberapa Masyarakat suku Bugis ikut berperan aktif dalam Partisipasi Pemilihan Walikota Samarinda seperti menjadi Tim pemenangan hingga menjadi panitia penyelenggara.

Antusiasme Masyarakat suku bugis dalam berpartisipasi terhadap Pemilihan Walikota Samarinda dapat dilihat dengan banyaknya yang menjadi Tokoh-tokoh besar yang ikut serta dalam dunia politik serta ikut handil dalam satu tujuan yaitu dengan pembangunan Kota Samarinda. Pencalonan Andi Harun dan Muhammad Darlis bisa dijadikan contoh bahwa tipe Gladiator ini merupakan tipikal yang dimana masyarakat menjadi peran langsung dalam Partisipasi Politik terkhusus di Pemilihan Walikota Samarinda. Selain dari itu ikut handil dalam penyelenggara seperti menjadi Panitia pelaksana pemilihan umum juga bagian dari tipe ini. Banyaknya tokoh-tokoh bugis yang menguasai Kalimantan Timur dan juga Kota Samarinda ini menjadikan sebuah faktor bahwa Masyarakat Suku Bugis memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan Partisipasi dalam Dunia Politik di Kalimantan Timur.

Pengeritik

Tipe Pengeritik merupakan tipe partisipasi politik lebih mengarah ke penekanan publik yang berupa kritikan serta adanya protes hingga penekanan secara agresif yang bersifat non konvensional dalam suatu pelaksanaan tugas atau pemerintahan. Pengeritik ini juga biasa disebut dengan partisipasi yang bersifat lawan dari partisipasi konvensional seperti adanya demonstrasi, tindakan kekerasan hingga revolusi. Seperti yang diungkapkan dalam Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17) yang menjelaskan bahwa Partisipasi Politik Tipe Pengeritik merupakan Partisipasi yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berpartisipasi secara tidak konvensional. Fenomena Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020 merupakan ajang pergantian

pemimpin Kota Samarinda yang sebelumnya dijabat oleh Bapak H. Syaharie Jaang selama dua Periode sejak Tahun 2010 hingga masa jabatannya berakhir di awal 2021. Ada beberapa yang menjadi permasalahan Kota Samarinda seperti banjir, sampah, tata kelola kota hingga tambang ilegal. Namun, tidak terdapat adanya tipe pengeritik terutama dalam partisipasi non konvensional seperti adanya demonstrasi, adanya revolusi dan lain sebagainya. Namun secara Umum tentunya masih ada beberapa masyarakat atau aktivis yang melakukan aksi untuk mengeritik pemerintah akan tetapi secara spesifik berupa partisipasi yang bersifat non konvensional Masyarakat suku bugis baik itu kelompok masyarakat atau paguyuban Suku Bugis tidak ada catatan bahwa mereka memiliki tipe partisipasi pengeritik.

Namun tanggapan dari Dosen pengamat politik menjelaskan bahwa Masyarakat Suku Bugis memiliki tipikal pengeritik dikarenakan Masyarakat Suku Bugis pada karakternya bersifat kritis serta berwatak keras. Namun dalam konteks penyampaian kritikan, mereka tetap menyampaikan secara langsung dan tidak ditinggal diam. Meskipun dalam karakteristik Masyarakat Suku Bugis sebagian memiliki karakter berwatak keras namun dalam Tipe pengeritik sendiri Masyarakat Suku Bugis tidak sampai berbuat agresif seperti adanya demonstrasi, griliya, Konfrontasi, Pengajuan Petisi, hingga sampai revolusi seperti di penjelasan partisipasi politik non konvensional menurut Almond dalam Syahfitri (2018:16) yang menjelaskan bahwa bentuk partisipasi politik yang tidak mengikuti prosedural seperti contohnya Pengajuan Petisi, Demonstrasi, Konfrontasi, Mogok, Tindakan Kekerasan, Gerilya, hingga Revolusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan tipe-tipe partisipasi politik yang terdapat pada Masyarakat Suku Bugis

berdasarkan tipe-tipe menurut Milbrath dan Goel dalam Muslim (2018:17):

1. Apatis, sebagian Masyarakat Suku Bugis termasuk di tipe ini dikarenakan kecenderungan mereka melepas diri dari pengetahuan terhadap situasi politik di Kota Samarinda serta adanya ketidaktahuan terhadap politik terutama dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020. Selain itu juga situasi Pandemi Covid-19 menjadi faktor sehingga kurangnya Masyarakat yang berpartisipasi di Pemilihan Walikota Samarinda.
2. Spectator, berdasarkan tipe ini beberapa Masyarakat Suku Bugis setidaknya hanya ikut berpartisipasi yaitu memilih dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020.
3. Gladiator, terkait tipe ini, kecenderungan Masyarakat Suku Bugis dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020 turut handil berpatisipasi secara maksimal dengan melihat adanya Tokoh-Tokoh Masyarakat Suku Bugis yang mencalonkan diri seperti Dr. H. Andi Harun dan Muhammad Darlis. Selain itu banyaknya Masyarakat Suku Bugis yang menjadi bagian seperti petinggi-petinggi partai hingga ada yang membantu menjadi panitia penyelenggara serta bagian dari tim sukses kemenangan pasangan calon.
4. Pengeritik, Dalam Masyarakat Suku Bugis tidak telalu terlihat dalam Tipe Partisipasi pengeritik, terutama Partisipasi Non-Konvensional baik Masyarakat hingga Paguyuban Masyarakat Suku Bugis.

REFERENSI

- Al-Farisi, Leli Salman. (2018). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. Indramayu: Jurnal Aspirasi Vol. 02.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Daulay, Muhammad Sayed dkk. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Jurnal Administrasi Publik Vol.9 No. 1 Hlm. 49-56.
- Meyer, Ferdinandus. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Karo Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Dusun VI Kecamatan Patumbuk Kabupaten Deli Serdang Periode 2019-2024. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Muslim, Sofyan. (2018). Partisipasi Politik Pemilih dalam Pilkada Serentak 2018.
- Patasaka, Rini. (2015). Persepsi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Manado. Jurnal Ilmiah Fisip UNPI Lyceum Volume 3.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharyanto, Agung. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Volume 2 No. 2 Hlm. 151-160.
- Syahfitri, Devila Sovia. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Utara Tahun 2013 (Studi Kasus Kelurahan Babula Kecamatan Medan Baru). Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 10 No.1 Hlm 57-62.